

**IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM RELEVANSINYA
TERHADAP PENERAPAN SANKSI ADAT LARANGAN SISTEM
PERKAWINAN EKSOGAMI DI DESA ADAT TENGANAN
PEGRINGSINGAN**

Oleh

Ni Komang Ayu Sintia, NIM 2014101011

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi adat larangan sistem perkawinan eksogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ditinjau dari substansi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta bagaimana dampak dan solusi dari pelanggaran praktik perkawinan eksogami terhadap masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan sifat pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Teknik penentuan sampel dilakukan adalah dengan teknik *purposive sampling* dengan studi dokumen, observasi, serta wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pelanggaran perkawinan eksogami yang mana penerapannya dikenakan sanksi adat berdasarkan *Awig-Awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Penerapan sanksi adat larangan sistem perkawinan eksogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tidak sesuai dengan ketentuan substansi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari larangan sistem perkawinan eksogami pengekangan dan pembatasan hak asasi manusia yang mana upaya untuk mengatasinya adalah dengan memperbaharui *Awig-Awig* Desa Adat serta pola pikir (*mindset*) masyarakat adat Tenganan Pegringsingan.

Kata Kunci : Perkawinan, eksogami, Desa Adat Tenganan Pegringsingan

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 6 PARAGRAPH (1) OF LAW NUMBER
16 OF 2019 CONCERNING MARRIAGE IN ITS RELEVANCE TO THE
IMPLEMENTATION OF TRADITIONAL SANCTIONS PROHIBITING
EXOAMOUS MARRIAGE SYSTEMS IN THE TRADITIONAL VILLAGE
OF TENGANAN PEGRINGSINGAN**

By

Ni Komang Ayu Sintia, NIM 2014101011

Legal Studies Program

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze how the implementation of customary sanctions prohibiting the exogamous marriage system in the Tenganan Pegringsingan Traditional Village is seen from the substance of Article 6 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, as well as the impact and solutions of prohibiting the practice of marriage. exogamy against the people of Tenganan Pegringsingan Traditional Village, Manggis District, Karangasem Regency. The type of research used is empirical juridical research using a sociological juridical approach. The research location was carried out in the Tenganan Pegringsingan Traditional Village, Manggis District, Karangasem Regency. The sampling technique used was purposive sampling technique with document study, observation and interviews. The data analysis technique used in this thesis research is descriptive qualitative. The research results show that there is a prohibition on exogamous marriages, the implementation of which is subject to customary sanctions based on the Awig-Awig of the Tenganan Pegringsingan Traditional Village. The implementation of customary sanctions prohibiting the exogamous marriage system in the Tenganan Pegringsingan Traditional Village is not in accordance with the substantive provisions of Article 6 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The impacts resulting from the prohibition of the exogamous marriage system are restraints and restrictions on human rights, which efforts to overcome are by renewing the Awig-Awig Traditional Village and the mindset of the Tenganan Pegringsingan traditional community.

Keywords: *Marriage, eksogami, Tenganan Pegringsingan Traditional Village*